

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Manajemen Bisnis di Era Globalisasi

ABSTRACT

Pancasila is the foundational ideology of Indonesia that plays an important role in guiding national life, including business management practices. Globalization has significantly influenced business activities, making them more competitive and profit-oriented. This condition often causes Pancasila values to be overlooked in managerial decision-making. In fact, Pancasila values serve as ethical guidelines for business activities. The integration of Pancasila values can balance economic interests with social responsibility. This article aims to examine the relevance and implementation of Pancasila values in Indonesian business management practices. The study is expected to contribute academically to the development of value-based business management.

Keywords: Pancasila; Business Management; Business Ethics; Globalization

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang berperan penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang manajemen bisnis. Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis yang semakin kompetitif dan berorientasi pada keuntungan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai-nilai Pancasila sering kali kurang mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Padahal, nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai pedoman etika dalam aktivitas ekonomi. Integrasi nilai Pancasila dalam manajemen bisnis dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relevansi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik manajemen bisnis di Indonesia. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan manajemen bisnis yang berlandaskan nilai kebangsaan.

Kata kunci: Pancasila; Manajemen Bisnis; Etika Bisnis; Globalisasi

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi moralitas, keadilan, dan keseimbangan sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dalam konteks pembangunan nasional, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dan moral. Hal ini termasuk dalam pengaturan aktivitas ekonomi dan bisnis. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara nilai Pancasila dan realitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa perlu terus diperkuat (Hasan, 2025).

Manajemen bisnis merupakan bidang yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Dalam perspektif etika bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Namun, paradigma bisnis modern sering kali menempatkan laba sebagai tujuan utama. Kondisi ini dapat mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Padahal, Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ketika nilai tersebut diabaikan, praktik bisnis berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, integrasi nilai Pancasila dalam manajemen bisnis menjadi kebutuhan yang mendesak (Bertens, 2013).

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian dan manajemen bisnis di Indonesia. Arus globalisasi mendorong perusahaan untuk bersaing di tingkat internasional. Standar efisiensi, produktivitas, dan inovasi menjadi tuntutan utama dalam dunia bisnis global. Namun, globalisasi juga membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan budaya lokal. Kondisi ini dapat menyebabkan melemahnya identitas nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa berpotensi terpinggirkan dalam praktik bisnis. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, globalisasi dapat mengikis

nilai kebangsaan. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi (Hasan et al., 2024).

Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi strategis dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya moral dan etika dalam setiap aktivitas manusia. Dalam dunia bisnis, nilai ini tercermin melalui kejujuran dan integritas. Banyak pelanggaran etika bisnis terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai moral. Praktik korupsi, manipulasi data, dan penipuan konsumen masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya nilai ketuhanan sebagai fondasi etika bisnis. Manajemen bisnis yang berlandaskan moral dapat menciptakan kepercayaan publik. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam membentuk budaya bisnis yang berintegritas (Magnis-Suseno, 1997).

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks bisnis, nilai ini berkaitan erat dengan perlakuan adil terhadap karyawan dan konsumen. Praktik eksploitasi tenaga kerja bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Banyak perusahaan masih mengabaikan kesejahteraan karyawan demi efisiensi biaya. Padahal, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi bisnis. Perlakuan yang adil dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang manusiawi juga mendorong terciptanya kinerja yang optimal. Oleh karena itu, penerapan nilai kemanusiaan menjadi aspek penting dalam manajemen bisnis (Siagian, 2015).

Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas nasional. Dalam dunia bisnis, nilai persatuan tercermin melalui kerja sama antar pelaku usaha. Persaingan yang tidak sehat dapat merusak stabilitas ekonomi nasional. Praktik monopoli dan kartel bertentangan dengan semangat persatuan. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu mengedepankan prinsip kolaborasi. Kerja sama yang sehat dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Selain itu, persatuan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang inklusif.

Dengan demikian, nilai persatuan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015). Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menekankan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi bisnis, prinsip ini diwujudkan melalui manajemen partisipatif. Karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Keputusan yang diambil secara demokratis cenderung lebih diterima oleh seluruh pihak. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan. Nilai demokrasi juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, penerapan sila keempat dapat meningkatkan efektivitas manajemen bisnis (Robbins & Coulter, 2016).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Dalam praktik bisnis, nilai keadilan sosial diwujudkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Program tanggung jawab sosial harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Distribusi manfaat ekonomi yang adil menjadi indikator bisnis yang beretika. Praktik bisnis yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, keadilan sosial harus menjadi orientasi utama dalam manajemen bisnis. Nilai ini memperkuat legitimasi sosial perusahaan (Porter & Kramer, 2011).

Mahasiswa manajemen bisnis memiliki peran strategis sebagai calon pelaku dan pemimpin bisnis masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai Pancasila menjadi sangat penting. Pendidikan bisnis tidak boleh hanya menekankan aspek teknis dan finansial. Nilai moral dan ideologis harus menjadi bagian integral dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter pelaku bisnis yang beretika. Tanpa nilai Pancasila, praktik bisnis berpotensi menyimpang dari tujuan kesejahteraan bersama. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai tersebut. Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda dalam dunia bisnis (Hasan et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam manajemen bisnis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai dasar ideologi dan sumber nilai dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Analisis normatif dilakukan melalui kajian terhadap konsep, teori, dan prinsip Pancasila yang relevan dengan etika bisnis. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas penerapan nilai Pancasila dalam praktik manajemen bisnis di Indonesia. Data empiris diperoleh melalui studi literatur terhadap penelitian terdahulu dan fenomena bisnis aktual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat kesenjangan antara norma dan praktik. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Metode normatif dan empiris dinilai relevan untuk mengkaji nilai ideologis dalam praktik bisnis modern (Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Manajemen Bisnis

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan moralitas sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Dalam manajemen bisnis, nilai ini tercermin melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika. Bisnis tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas moral. Ketika nilai ketuhanan diabaikan, praktik bisnis cenderung menyimpang dari prinsip etika. Hal ini terlihat dari berbagai kasus kecurangan, manipulasi data, dan penipuan konsumen. Nilai ketuhanan mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan aspek benar dan salah dalam setiap keputusan. Dengan menjadikan etika sebagai landasan, bisnis dapat dijalankan secara bermartabat. Oleh karena itu, sila

pertama memiliki peran penting dalam membentuk manajemen bisnis yang beretika (Keraf, 1998).

Implementasi nilai ketuhanan juga berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menjunjung nilai moral cenderung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut merupakan aset non-material yang sangat penting dalam dunia bisnis. Selain itu, nilai ketuhanan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Pengambilan keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada pertimbangan moral. Hal ini sejalan dengan konsep etika bisnis yang menekankan tanggung jawab moral pelaku usaha. Dengan berlandaskan nilai ketuhanan, perusahaan dapat menghindari praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Implementasi sila pertama menjadi dasar terciptanya tata kelola bisnis yang berintegritas.

Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Manajemen Bisnis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Dalam manajemen bisnis, nilai ini berkaitan erat dengan perlakuan terhadap karyawan sebagai pemangku kepentingan utama. Karyawan bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak dan kebutuhan. Praktik bisnis yang mengabaikan kesejahteraan karyawan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kondisi kerja yang tidak layak dan upah yang tidak adil masih menjadi persoalan dalam dunia bisnis. Nilai kemanusiaan mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, produktivitas dan loyalitas karyawan dapat meningkat. Oleh karena itu, sila kedua memiliki relevansi kuat dalam manajemen bisnis modern (Freeman, 1984).

Selain terhadap karyawan, nilai kemanusiaan juga harus diterapkan dalam hubungan perusahaan dengan konsumen dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan produk dan layanan yang aman serta berkualitas. Praktik bisnis yang merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip keadaban. Dalam perspektif kemanusiaan, bisnis harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara luas. Pendekatan ini sejalan dengan

konsep stakeholder yang menekankan tanggung jawab perusahaan kepada berbagai pihak. Manajemen bisnis yang berorientasi pada kemanusiaan akan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Dengan demikian, sila kedua menjadi landasan penting dalam mewujudkan bisnis yang berkeadilan.

Implementasi Nilai Persatuan Indonesia dalam Manajemen Bisnis

Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa. Dalam dunia bisnis, nilai ini tercermin melalui kerja sama antar pelaku usaha. Persaingan bisnis seharusnya dilakukan secara sehat dan tidak saling merugikan. Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat bertentangan dengan semangat persatuan. Nilai persatuan mendorong terciptanya sinergi antar perusahaan. Kerja sama yang baik dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks ini, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan individu, tetapi juga kepentingan bersama. Oleh karena itu, sila ketiga memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat (Sen, 1999).

Implementasi nilai persatuan juga relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Perusahaan nasional perlu bersatu untuk bersaing dengan perusahaan multinasional. Jika pelaku usaha hanya mementingkan kepentingan sendiri, maka ekonomi nasional akan melemah. Nilai persatuan mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dan usaha kecil. Kolaborasi tersebut dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, persatuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Manajemen bisnis yang berlandaskan persatuan akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sila ketiga menjadi dasar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam Manajemen Bisnis

Nilai kerakyatan dalam Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen bisnis, nilai ini tercermin melalui gaya kepemimpinan partisipatif. Keputusan strategis perusahaan seharusnya tidak ditentukan secara sepikah oleh pimpinan. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Selain itu, musyawarah mendorong terciptanya keputusan yang lebih bijaksana. Kepemimpinan yang demokratis juga dapat mengurangi konflik internal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sila keempat relevan dalam manajemen organisasi modern. Implementasi musyawarah memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat (Dahl, 1985).

Penerapan nilai kerakyatan juga berpengaruh terhadap efektivitas manajemen bisnis. Ketika karyawan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, inovasi dapat berkembang lebih baik. Proses musyawarah memungkinkan berbagai sudut pandang dipertimbangkan secara adil. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbukaan dalam manajemen menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Nilai kebijaksanaan menjadi kunci dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan karyawan. Dalam konteks bisnis modern, kepemimpinan partisipatif semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, sila keempat menjadi pedoman penting dalam manajemen bisnis yang demokratis.

Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Manajemen Bisnis

Sila Keadilan Sosial menekankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam manajemen bisnis, nilai ini berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Perusahaan tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Namun, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap karyawan dan masyarakat.

Ketimpangan ekonomi sering kali muncul akibat praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial harus menjadi dasar dalam kebijakan perusahaan. Penerapan keadilan sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan (Rawls, 1971).

Implementasi keadilan sosial dalam bisnis juga tercermin melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan diharapkan berkontribusi pada pembangunan masyarakat sekitar. Program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu bentuk nyata penerapan sila kelima. Selain itu, keadilan sosial juga berkaitan dengan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi. Perusahaan yang adil akan memberikan peluang yang sama bagi seluruh karyawan. Nilai ini mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam jangka panjang, keadilan sosial memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, sila kelima menjadi fondasi penting dalam manajemen bisnis berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik manajemen bisnis di Indonesia. Setiap sila mengandung nilai moral, sosial, dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi sila pertama menekankan pentingnya etika dan integritas dalam bisnis. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan kerja dan bisnis. Sila ketiga mendorong persatuan dan kerja sama antar pelaku usaha. Sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dan kepemimpinan partisipatif. Sila kelima menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, manajemen bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. (2013). Etika. PT Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, R. A. (1985). A preface to economic democracy. University of California Press.

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.

Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.

Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., Putra, M. I., Devary, A., Satya, F. Y., & Berlando,

M. M. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia.

JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 287–298.

Keraf, A. S. (1998). Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya. Kanisius.

Magnis-Suseno, F. (1997). Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. PT Gramedia Pustaka Utama.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). Management (13th ed.). Pearson Education.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.

Siagian, S. P. (2015). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara. Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education.